

ABSTRAK

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia

Oleh

NAME : M. Noer Fazrullah
NPM : 0851031030
No. Telp : 081279555313
Email : Fazrullahnoer@rocketmail.com
Pembimbing I : Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.
Pembimbing II : Pigo Nauli, S.E,M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* seperti, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit serta leverage dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang diambil sebagai sampel 29 perusahaan dan jumlah observasi yang dilakukan selama tahun 2011-2013 adalah 87 item observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi liner berganda.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa, dari keseluruhan variabel bebas yang ada, hanya variabel kepemilikan institusional, dan komite audit yang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan variabel lain yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, leverage dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Bagi investor pada perusahaan perbankan hendaknya mempertimbangkan ukuran dewan direksi, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh negatif yang terbesar terhadap manajemen laba.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, *Leverage*, kualitas audit, Manajemen Laba

ABSTRACT

Effect of Corporate Governance on Earnings Management in Banking Industry Indonesia

By

NAME	: M. Noer Fazrullah
NPM	: 0851031030
No. Telp	: 081279555313
Email	: Fazrullahnoer@rocketmail.com
Preceptor I	: Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.
Preceptor II	: Pigo Nauli, S.E,M.Sc.

This study aims to provide empirical evidence of the influence of corporate governance mechanisms such as, institutional ownership, the proportion of independent directors, the size of the board of directors, audit committee size and leverage and audit quality on earnings management. The population in this study are all banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2013, companies were sampled 29 companies and the number of observations made during 2011-2013 was 87 items observation. The analytical method used is multiple linear regression.

The study concluded that, of all the independent variables, only variables institutional ownership, and the audit committee has no effect on earnings management, while the other variable is the proportion of independent directors, board size, leverage and influence audit quality on earnings management. For investors in the banking company should consider the size of the board, because the results of this study indicate that the size of the board of directors has the largest negative effect on earnings management.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Leverage, audit quality, Earnings Management*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari komponen *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Konsep *good corporate governance* muncul untuk meminimalkan potensi kecurangan akibat *agency problem*. Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2007).

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2011:113) “kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Laba merupakan salah satu informasi dalam laporan keuangan yang sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan. Baik kreditor maupun investor, menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, memprediksi laba di masa yang akan datang, dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang.

Perusahaan dengan tingkat laba yang lebih tinggi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba yang lebih rendah. Dalam melakukan pencatatan laba, perusahaan diberikan fleksibilitas oleh standar akuntansi untuk memilih metode akuntansi maupun estimasi yang akan digunakan.

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba merupakan perilaku oportunistis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika ada manfaat yang diperolehnya. Apabila tidak ada manfaat yang bisa diperolehnya maka manajer akan menyembunyikan atau menunda

pengungkapan informasi itu bahkan kalau diperlukan akan mengubah informasi itu (Sulityanto, 2008).

Adanya hubungan keagenan antara pihak manajemen (agen) dengan investor (prinsipal) sering menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan manusia selalu menghindari risiko. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Scott, 2006).

Saat ini manajemen laba menjadi sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan-kebijakan akuntansi tertentu oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manajemen laba merupakan suatu intervensi manajer terhadap proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi manajer maupun perusahaan. Berdasarkan Laporan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terdapat 25 kasus pelanggaran pasar modal yang terjadi selama tahun 2002 sampai dengan Maret 2003. Dari 25 kasus pelanggaran tersebut terdapat 13 kasus yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan keterbukaan informasi (Utami, 2005:100). Banyak kasus manajemen laba yang telah diketahui publik Indonesia seperti kasus PT. Lippo Tbk, kasus PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Sedangkan di Amerika Serikat juga terjadi kasus manajemen laba yaitu Enron Corporation dan Xerox Corporation.

Berdasarkan teori keagenan, tindakan manajemen dapat diatasi atau diminimalisir melalui mekanisme *good corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Menurut *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004) *corporate governance* adalah sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemuatan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. Sedangkan menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi. Teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan

kontrak, dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Salah satu penyebab manajemen laba adalah *leverage*. *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. *Leverage* diukur dengan cara perbandingan total utang dengan total aset. *Financial leverage* merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetap, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil.

Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa utang. Menurut Herawaty dan Baridwan (2007) utang dapat meningkatkan manajemen laba saat perusahaan ingin mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian utang dan meningkatkan posisi tawar perusahaan selama negosiasi utang.

Selain itu, kualitas audit pun tak luput mempengaruhi manajemen laba. Kualitas audit merupakan salah satu indikator yang bisa menekan praktik manajemen laba. Ketika laporan keuangan perusahaan di audit oleh pihak yang memiliki reputasi serta pengalaman yang banyak secara tidak langsung laporan atau hasil audit yang disajikan memiliki kualitas yang baik dan dapat diuji dikarenakan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi lebih besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan audit. Sehingga KAP yang memiliki reputasi lebih dapat menekan segala kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan yang memiliki reputasi rendah.

Banyak penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba, antara lain: Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Boediono (2005), dan Utama (2005). Akan tetapi penelitian tersebut dilakukan tidak terfokus pada sektor perusahaan tertentu. Penelitian ini berfokus kepada industri perbankan di Indonesia. Alasan ini dilakukan karena sejalan dengan perkembangannya, bank membutuhkan dana yang lebih besar. Mengingat dana yang diperoleh menjadi faktor pendukung kegiatan usaha bank untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kredit, maka bank berupaya mendapatkan dana tersebut. Bank berpendapat bahwa kekurangan dana ini menjadikan *go public* sebagai pilihan terbaik untuk menghimpun dana masyarakat yang berasal dari penjualan saham di bursa efek. Namun, untuk berhasil menarik minat para investor tentu saja bank harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih efisien dan menguntungkan serta prospek pertumbuhan yang baik sehingga saham yang dijual mampu menjanjikan *return* menarik bagi investor.

Selain itu, menurut Rahmawati dkk (2006), Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI tersebut.

Laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”.

Jika investor berkurang kepercayaannya karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*. Pengukuran manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus perusahaan perbankan (Beaver dan Engel, 1996, dalam Nasution, 2012).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia”**

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.
2. Apakah leverage dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji mekanisme *corporate governance* seperti, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, leverage dan kualitas audit terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* seperti, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh leverage dan kualitas audit terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *corporate governance* dan manajemen laba.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *good corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan.
- Memberikan masukan kepada para investor sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

3.1 Agency Theory

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2007).

Menurut Widyaningdyah (2001) *agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Teori agensi (*agency theory*) menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik modal (*principles*). Konflik tersebut timbul karena masing-masing pihak (*agent dan principles*) berusaha untuk mencapai tujuan yang saling bertentangan, yaitu berkaitan dengan pencapaian bonus manajemen.

3.2 Teori Stakeholder

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970an, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai (*value*) secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. (Watiningsih, 2011).

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholder*), namun lebih luas lagi bahwa

kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan (Watiningsih, 2011). Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ghozali dan Chariri, 2007).

3.3 Laporan Keuangan

Keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Contoh faktor risiko: perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi.

Menurut pedoman etika akuntan IAI, laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Harahap (2011) menyatakan laporan keuangan (*financial statement*) merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan yang lainnya. Ada 3 macam laporan keuangan yang pokok dihasilkan yaitu neraca, laporan laba-rugi, dan laporan aliran kas.

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, dengan membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan selama satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen yaitu, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai

tujuan sebagai alat informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2011). Laporan keuangan sebuah perusahaan sangat banyak yang berkepentingan atas informasi yang disajikan, salah satunya adalah investor.

3.4 *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan cara-cara manajemen perusahaan (*para direktur*) bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. *OECD* telah mengembangkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang diterapkan sesuai dengan kondisi diberbagai negara.

Prinsip dasar tersebut adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), kewajaran (*Fairness*) dan tanggungjawab (*Responsibility*) yang mencakup lima aspek yaitu: perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*, keterbukaan dan transparansi, dan peranan *Board of Director* dalam perusahaan. Keempat prinsip *corporate governance* diatas digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan transparansi yang berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi adalah perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak mengenai struktur kepemilikan perusahaan, serta perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang

dan hak kewajiban. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengungkapan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

3. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktik kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktik kecurangan (*Fraud*) dan praktik-praktik insider trading.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab, Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam *corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Responsibilitas juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

Walaupun banyak pendapat tentang definisi dan tujuan *Corporate Governance*, namun demikian ada prinsip dasar yang berlaku universal. Sebagai gambaran, untuk berhasil di pasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah (FCGI, 2002).

3.5 Manajemen Laba

Belum ada definisi tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan manajemen laba. Masing-masing peneliti memberikan definisinya. Manajemen laba dapat diartikan bermacam-macam, tergantung sudut pandang masing-masing. Scott (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut “*Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm*”. Dari definisi tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Scott (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku *opportunistik* manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs* (*Opportunistic Earnings*

Management). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari prespektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dari sudut pandang etika, Schipper (1998) dalam Sutrisno (2002) menyatakan bahwa manajemen laba adalah suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privet (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Pada dasarnya manajer memanager laba karena *earnings* atau laba telah dijadikan sebagai target dalam proses penilaian prestasi kerja departemen (manajer) secara khusus dan perusahaan (organisasi) secara umum. Scott (2006:302) dalam Sulistyanto (2008) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1. *Bonus Purposes*, manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan.
2. *Political Motivations*, manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
3. *Taxation Motivation*, motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
4. Pergantian *CEO*, *CEO* yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan berusaha memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
5. *Initial Public Offering* (IPO), manajer perusahaan akan melakukan *earnings management* agar harga sahamnya saat penawaran perdana (IPO) lebih tinggi, sedangkan kapitalisasi modal perusahaan menjadi lebih besar. Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan.

Motivasi lain manajemen laba dilihat dari sudut pandang akuntansi adalah karena ada dua keterbatasan para pengguna dalam menginterpretasi pelaporan keuangan. Pertama, kriteria penyajian elemen pelaporan keuangan rentan terhadap kebijakan manajemen, yaitu pihak manajemen memiliki peluang dan kebebasan untuk menerapkan kebijakan manajemen yang berhubungan dengan pencatatan dan metode akuntansi yang akan digunakan untuk pelaporan keuangannya. Kedua, tidak ada observasi sempurna mengingat tidak semua kebijakan manajemen dapat diobservasi oleh para pengguna laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara investor dengan manajemen perusahaan yang berpeluang untuk melakukan manipulasi laba sehingga mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan ke publik.

3.6 Leverage

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan tingkat asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset, rasio *times interest earned*, dan rasio *fixed charges coverage*.

1. Rasio total hutang terhadap aset menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan *leverage* keuangan (*financial leverage*) yang tinggi. Penggunaan *financial leverage* yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham (*return on equity* atau ROE) dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham (ROE) akan menurun cepat pula. Risiko perusahaan dengan *financial leverage* yang tinggi akan semakin besar pula.
2. Rasio *times interest earned* menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman, meskipun barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan hutang (penggunaan *financial leverage*) perusahaan. Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen.
3. Rasio *fixed charge coverage* menghitung kemampuan perusahaan membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa. Memperhitungkan sewa karena meskipun sewa bukan hutang tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan hutang perusahaan, beban tetap tersebut mempunyai efek yang sama dengan beban bunga.

3.7 Kualitas Audit

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009). Klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi masa perikatan auditnya, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Peraturan-peraturan pada kewajiban rotasi auditor merupakan peraturan yang mengatur tentang pembatasan audit yaitu *audit tenure* dan *auditor switching* sekarang ini di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008 pasal 3 dapat disimpulkan bahwa tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan

boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang lain.

3.8 Hipotesis Penelitian

3.8.1 Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba

Investor institusional diduga lebih mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba, dibanding dengan investor individual. Investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Secara singkat dapat dikatakan bahwa antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif. Dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. Jiambalvo dkk (1996) menemukan bahwa nilai absolute akrual diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan investor institusional. Midiastuty & Machfoedz (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Tetapi Darmawati (2003) tidak menemukan bukti adanya hubungan antara pengelolaan laba dengan kepemilikan institusional.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

3.8.2 Proporsi Komisaris Independen terhadap manajemen laba

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris independen harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik, berdasarkan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Subprinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Oleh karena itu, terhadap manajemen laba, merupakan alat yang sangat berguna bagi terutama komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengembalian keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, sehingga mereka akan cenderung menghindari manajemen laba, di lain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki komisaris independen yang rendah akan memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk melakukan manajemen laba secara bebas.

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

3.8.3 Ukuran Dewan Direksi terhadap manajemen laba

Manajer atau dewan direksi dapat melakukan *earnings management* untuk membingungkan pemilik atau pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan melihat dari laporan keuangan perusahaan, dimana pemilik atau pemegang saham akan sulit mengetahui yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan melalui data atau angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Dewan direksi memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan direksi. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian Midiastuty & Machfoedz (2003) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H3: Ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba

3.8.4 Ukuran Komite Audit terhadap manajemen laba

Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit bekerja sama dengan pihak yang berkaitan dengan fungsi internal audit dan staf keuangan perusahaan. Komite audit akan melakukan *review* terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pengungkapan dan isi yang telah diaudit oleh akuntan publik, melakukan *review* mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi, hal-hal serta penilaian signifikan lainnya yang terdapat pada laporan keuangan, independensi dan obyektifitas dari akuntan publik. Hubungan agensi akan terjadi jika *principal* mempekerjakan orang lain, dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *principal*. Hubungan agensi dapat menimbulkan beberapa permasalahan karena terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan agen. Asimetri informasi inilah yang dapat menjadi celah terjadinya *fraud*. Untuk mencegah terjadinya *fraud*, dibutuhkan pihak lain yakni komite audit independen. Komite audit sebaiknya memiliki keahlian dalam keuangan. Hal ini dikarenakan keahlian keuangan itulah yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jiambalvo *et al*, (1996) menulis bahwa komite audit dipandang sebagai mekanisme pemantauan yang secara sukarela bekerja dalam situasi keagenan tinggi untuk meningkatkan kualitas arus informasi.

H4: Ukuran komite audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

3.8.5 Leverage terhadap manajemen laba

Leverage merupakan seberapa besar pinjaman yang atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan akan cenderung melaporkan *profitabilitas* yang tinggi pula. Disamping itu, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat mendorong terjadinya manipulasi laba pada laporan keuangan. Harjitodan Martono (2005) berpendapat bahwa terdapat potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholders* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan hutang yang tinggi. *Leverage* merupakan proksi kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit.

H5: Leverage berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba

3.8.6 Kualitas Audit terhadap manajemen laba

Kualitas audit dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran KAP, ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang.

KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil. Dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien sangat berarti karena kliennya sedikit (Febrianto, 2009). Sehingga KAP besar seperti Big 4 biasanya dianggap

lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil. Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit

tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis (Naftalia, 2013).

H6: Kualitas Audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

3.9 Kerangka Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menguji mekanisme *corporate governance* seperti, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian ini menambahkan variabel *leverage* dan kualitas audit sebagai variabel control dengan alasan hutang dapat meningkatkan manajemen laba saat perusahaan ingin mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian hutang dan meningkatkan posisi tawar perusahaan selama negosiasi hutang. Selain itu, kualitas audit pun tak luput mempengaruhi manajemen laba. Kualitas audit merupakan salah satu indikator yang bisa menekan praktik manajemen laba. Ketika laporan keuangan perusahaan di audit oleh pihak yang memiliki reputasi serta pengalaman yang banyak secara tidak langsung laporan atau hasil audit yang disajikan memiliki kualitas yang baik. Berikut kerangka pikir penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

6.1 Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiono, 2009). Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2013.
2. Perusahaan Perbankan yang selama tahun penelitian 2011-2013 tidak mengalami delisted.
3. Perusahaan yang secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2011-2013
4. Perusahaan yang dalam laporan tahunannya mempunyai data kepemilikan saham oleh perusahaan selama tahun penelitian 2011-2013.
5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian 2011-2013.
6. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah, dikarenakan penelitian dilakukan di Indonesia maka laporan keuangan yang digunakan adalah yang di nyatakan dalam rupiah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, karena data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data penelitian didapat dari *Website* pasar modal (www.idx.co.id), dan situs perusahaan yang bersangkutan.

6.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2009). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

6.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran, 2006). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Variable manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus perusahaan perbankan (Beaver dan Engel, 1996, dalam Nasution, 2012). Model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

CO_{it}	: <i>loan charge offs</i> (pinjaman yang dihapus bukukan)
$LOAN_{it}$: <i>loans outstanding</i> (pinjaman yang beredar)
NPA_{it}	: <i>non-performing assets</i> (aktiva produktif yang bermasalah),
ΔNPA_{it}	: selisih <i>non-performing assets</i> $_t$ dengan <i>non-performing assets</i> $_{t-1}$
TA	: Total Akrual
$NDA_{it} = TA - (\beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it} + 1)$	

Sesuai dengan definisinya bahwa:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Dimana:

TA_{it} = total akrual

NDA_{it} = akrual non kelolaan

DA_{it} = akrual kelolaan

Maka:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Berikut keterangan item-item yang menjadi pembentuk perhitungan model akrual khusus perusahaan perbankan:

1. *Loan charge offs* : [pinjaman](#) atau [kredit macet](#) yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari [neraca](#) (*on-balance sheet*) dan dicatat pada [rekening administratif](#) (*off-balance sheet*); penghapusbukkan pinjaman atau kredit macet tersebut dibebankan pada [akun](#) penyisihan penghapusan [aktiva produktif](#).
2. *Loans outstanding* : Jumlah penyediaan [uang](#) atau [tagihan](#) yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau [perjanjian kredit](#) (kesepakatan pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak [peminjam](#) untuk melakukan [pelunasan utang debitur](#) tersebut setelah [jangka waktu](#) tertentu dengan pemberian [bunga](#).
3. *Non-performing assets* : aktiva produktif yang tingkat [tagihan](#) atau [kolektibilitas](#) tergolong [kredit kurang lancar](#), [kredit diragukan](#), dan [kredit macet](#); yang dimaksud dengan aktiva produktif dalam hal ini adalah [kredit](#), penanaman pada bank lain, [surat berharga](#) yang dimiliki, dan penyertaan.

6.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat (Sugiono, 2007). Variable independen dalam penelitian ini adalah:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham oleh perusahaan ini dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelaporan keuangan (Skousen *et al.*, 2009). Rasio kepemilikan saham perusahaan dapat diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki perusahaan}}{\text{Total saham beredar}}$$

2. Proporsi Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI.

$$KOIN = \frac{\text{komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris}}$$

3. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi. Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan direksi (Subramaniam, et al., 2009).

4. Ukuran Komite Audit

Menurut Keputusan Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004, yang dimaksud dengan komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Di Indonesia, setidaknya terdapat satu anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi. Mengacu pada penelitian Purwati (2006), variabel ini diukur dari prosentase anggota komite Audit yang kompeten di bidang keuangan dengan jumlah komite Audit. Kompetensi keuangan dilihat dari apakah anggota komite audit tersebut memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

$$UKA = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

5. Leverage

Leverage merupakan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai operasinya. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan hutang. *Leverage* diukur dengan membandingkan total hutang dengan total aset.

$$Lev = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$$

6. Kualitas Audit

Variabel Kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4*, maka diberikan nilai 0. Berikut daftar KAP yang termasuk dalam Big 4.

- KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Osman, Ramli, Satrio dan rekan.
- KAP *Ernst and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.
- KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan.
- KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta, Siddharta dan Widjaja.

6.3 Metode Analisis Data

6.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

6.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam model regresi perlu dilakukan agar hasil analisis regresi dapat memenuhi kriteria *best*, *linear* dan supaya variabel independen sebagai estimator atas variabel dependent tidak bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

6.3.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah untuk untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan dependent memiliki distrik normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas menurut Kolmogrof Smirnov satu arah dan analisis grafik Smirnov menggunakan tingkat kepercayaan 5 %. Sebagai dasar pengujian keputusan normal atau tidak yaitu (Ghozali, 2009):

- a. $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ maka distribusi populasi tidak normal
- b. $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ maka distribusi populasi normal.

Sedangkan analisis grafik menggunakan grafik histogram dan normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distrik kumulatif dari distribusi normal dalam hal ini distribusi normal akan membantu garis lurus diagonal.

6.3.2.2 Uji Heteroskedastik

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastik, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah yang homokedastik atau tidak terjadi heteroskedastik. Heteroskedastik terjadi apabila ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependent pada variabel independen. Hal ini akan mengakibatkan varians koefisien regresi menjadi minimum dan *convidence interval* melebihi sehingga hasil uji statistik tidak valid.

6.3.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji korelasi antara variabel-variabel independen dengan korelasi sederhana. Menurut Ghozali (2009) uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel imdependent dimana model regresi yang baik tidak terjadi ortogonal. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah dengan menganalisis korelasi variabel-variabel independent. Jika antara variebel ada korelasi yang cukup tinggi ($> 0,90$) maka hal ini menunjukkan indikasi multikolinearitas dengan menunjukkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF). Indikator adanya multikolinearitas yang relevan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antar independent variabel akan tetapi tidak ada atau sangat sedikit penguji yang signifikan. Model regresi yang bebas multikolinaritas adalah:

- a. Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10
- b. Mempunyai angka toleransi mendekati 1

Bila ada variabel independent yang terkena multikolinearitas maka penanggulangannya adalah dengan mengeluarkan satu variabel tersebut dari model.

6.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif (dalam skala angka) dengan alat analisis regresi berganda, metode regresi berganda (*multiple regresional*) dilakukan terhadap model yang diajukan oleh peneliti menggunakan program SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e_t$$

Keterangan :

Y : Manajemen Laba

X_1 : Kepemilikan Institusional
 X_2 : Proporsi Komisaris Independen
 X_3 : Ukuran Dewan Direksi
 X_4 : Ukuran Komite Audit
 X_5 : Leverage
 X_6 : Kualitas Audit
 e_t : *Error term*

6.4 Pengujian Hipotesis

6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel dependen. Bila terdapat nilai *adjusted* R^2 bernilai negatif, maka *adjusted* R^2 dianggap nol.

6.4.2 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan:

- $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6 = 0 \Rightarrow$ artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent.
- $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6 \neq 0 \Rightarrow$ artinya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent.

Keputusan menolak atau menerima H_0 sebagai berikut:

- a. Jika t hitung $>$ t kritis, maka H_0 ditolak
- b. Jika t hitung $<$ t kritis, maka H_0 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan/*annual report* seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia. Sumber data berasal dari Situs Bursa Efek Indonesia, yang berupa laporan keuangan yang diterbitkan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Table 4.1 berikut ini menyajikan prosedur pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1. Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011.	31
Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel:	
1. Perusahaan Perbankan yang selama tahun penelitian 2011-2013 mengalami delisted	(0)
2. Perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2009-2013	(2)
3. Perusahaan yang dalam laporan tahunannya mempunyai data kepemilikan saham oleh perusahaan selama tahun penelitian 2011-2013.	(0)
4. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang asing	(0)
Total Sampel penelitian	29

Sumber : Indonesian Capital Market Directory. (diakses tanggal 15 Januari 2015 -05 Februari, 2015)

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 adalah 39 perusahaan, tetapi karena penelitian ini dimulai tahun 2011, dan perusahaan yang terdaftar tahun 2011 sebanyak 31 perusahaan. Jumlah Perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2011-2013 adalah 2 perusahaan. Jadi perusahaan yang diambil sebagai sampel 29 perusahaan dan jumlah observasi yang dilakukan selama tahun 2011-2013 adalah 87 item observasi.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	87	.1544	.9960	.617305	.2013762
X2	87	.50	1.00	.6068	.11843
X3	87	4	13	7.15	2.499
X4	87	.33	1.00	.7623	.17896
X5	87	.0351	.9956	.847328	.1767399
X6	87	0	1	.55	.500
Y	87	.00	.32	.0422	.05560
Valid N (listwise)	87				

Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar. Nilai rata-rata (deviasi standar) X1 adalah 0,617 (0,2013). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki kepemilikan perusahaan yang tinggi dengan nilai minimum (maksimum) untuk X1 adalah 0,154 (0,996). Nilai minimum (maksimum) untuk X2 adalah 0,50(1), dan rata-rata (deviasi standar) X2 adalah 0,6068 (0,11843). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki komisaris independen terhadap jumlah komisaris sebesar 60%, dan ada perusahaan perbankan yang keseluruhan komisarisnya adalah komisaris independen.

Nilai minimum (maksimum) untuk X5 adalah 0,0351 (0,9956), dan rata-rata (deviasi standar) X5 adalah 0,847 (0,1767). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki leverage yang termasuk tinggi dengan rata-rata sebesar 84,7%. Nilai minimum (maksimum) untuk X6 adalah 0 (1), dan rata-rata (deviasi standar) X6 adalah 0,422 (0,5560) hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel mempunyai kantor akuntan publik non big 4 dalam meng-audit laporan keuangannya.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai yang efisien dan tidak bias atau BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dari satu persamaan regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik (Ghozali, 2009).

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel terdistribusi secara normal normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov Smirnov test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04208370
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		.151

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p-value*) seluruh variabel lebih besar diatas level signifikansi 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 yang berarti terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel bebas dan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (kofisien lemah tidak lebih besar dari 5) . Jika *VIF* lebih besar dari 10, apabila *VIF* kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikonelaritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.945	1.058
	X2	.798	1.253
	X3	.767	1.304
	X4	.852	1.173
	X5	.937	1.067
	X6	.910	1.099

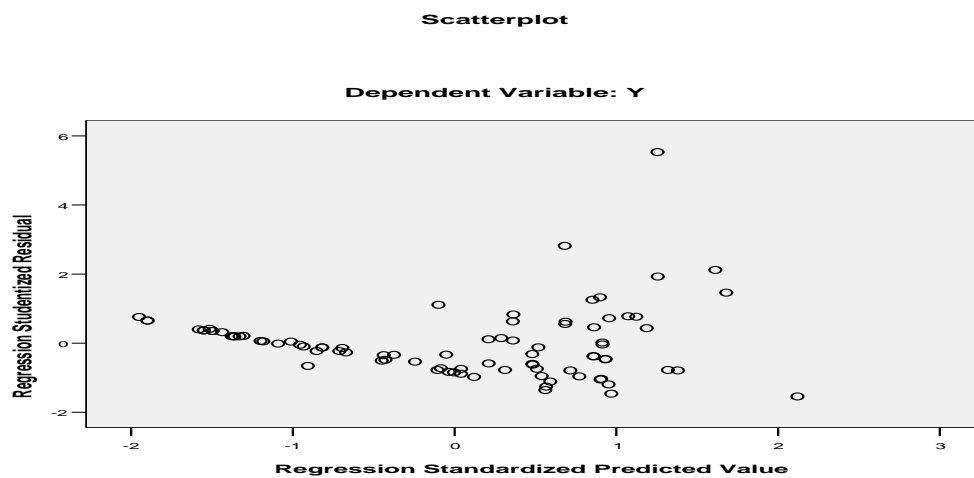
a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji multikolinieritas pada Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa variable X1, X2, X3,X4, X5, dan X6 memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (10%) yang artinya bahwa korelasi antar variabel bebas tersebut nilainya kurang dari 95%, dan hasil dari *varian inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa X1, X2, X3,X4, X5, dan X6 kurang dari 10. Dimana, jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF kurang dari 10, maka dalam pengujian data tersebut tidak terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolonelitas.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2009).

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan grafik scatterplots bahwa titik-titik tidak berkumpul dan menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi pada penelitian ini.

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654 ^a	.427	.384	.04363	2.120

a. Predictors: (Constant), X6, X3, X1, X5, X4, X2

b. Dependent Variable: Y

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan dilakukan pengujian *Durbin-Watson* (*Dw_test*). Hasil pengujian diperoleh nilai $Dw = 2,120$ sedangkan $Du_{tabel} = 1,801$ ($N=87, k=6$). Berdasarkan kriteria tersebut maka $1,801 < 2,120$, sehingga dapat disimpulkan bahwa, tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji statistik t, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.6

Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	Adjusted R ²	R ²
1	0.654	0.427

Sumber: Lampiran 4

Hasil pengujian tersebut memperoleh nilai R² sebesar 0,427 yang artinya, 42,7% variabel manajemen laba pada perusahaan perbankan dapat dijelaskan oleh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit serta *leverage* dan kualitas audit. Sedangkan sisanya sebesar 57,3 % dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian.

4.3.2 Uji Statistik t

Tabel 4.7

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.181	.046		3.915	.000
	X1	.039	.024	.142	1.626	.108
	X2	-.083	.044	-.377	-2.272	.015
	X3	-.015	.002	-.693	-7.174	.000
	X4	.004	.028	.012	.131	.896
	X5	.042	.006	.173	1.805	.048
	X6	-.051	.010	-.211	-1.952	.032

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=0,181+0,039X_1-0,083X_2-0,015X_3+0,004X_4+0,042X_5-.051X_6$$

Dari model regresi yang terbentuk tersebut maka diperoleh hubungan antara masing-masing variabel independen yaitu kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit serta *leverage* dan kualitas audit dengan variabel dependen manajemen laba yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bertanda negatif sebesar **0,181** menyatakan, bahwa jika tidak ada kegiatan dari ke-enam variabel bebas tersebut yang mempengaruhi manajemen laba (Y), maka manajemen laba (Y) adalah positif.
2. Koefisien regresi X1 bertanda positif sebesar **0.039** menyatakan, bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, serta mempunyai nilai signifikan (0,108) lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan "*Kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba*", ditolak.
3. Koefisien regresi X2 bertanda negatif sebesar **-0.083** menyatakan, bahwa variabel proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba, serta mempunyai nilai signifikan (0,015) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan "*Proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba*", diterima.
4. Koefisien regresi X3 bertanda negatif sebesar **0.233** menyatakan, bahwa variabel ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba,

serta mempunyai nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*Ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba*”, ditolak.

5. Koefisien regresi X4 bertanda positif sebesar **0.004** menyatakan, bahwa variabel ukuran komite audit, memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, tetapi mempunyai nilai signifikan (0,896) lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*Ukuran komite audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba*”, ditolak.
6. Koefisien regresi X5 bertanda positif sebesar **0.042** menyatakan, bahwa variabel *Leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, serta mempunyai nilai signifikan (0,048) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*Leverage berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba*”, diterima.
7. Koefisien regresi X6 bertanda negatif sebesar **-0.051** menyatakan, bahwa variabel kualitas audit, memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba, dan mempunyai nilai signifikan (0,032) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*Kualitas Audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba*”, diterima.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit serta *leverage* dan kualitas audit terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa model regresi sesuai dengan hasil observasi dari penelitian. Dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat yang digunakan dalam penelitian berhubungan dengan variabel bebasnya.

4.4.1 Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil pengujian kepemilikan institusional ini dapat diperoleh dengan cara membagi total saham yang dimiliki perusahaan dengan total saham beredar terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Midiastuty & Machfoedz (2003) yang menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba, tetapi mempunyai kesamaan hasil dengan penelitian Darmawati (2003) tidak menemukan bukti adanya hubungan antara pengelolaan laba dengan kepemilikan institusional. Hasil yang tidak berpengaruh dimungkinkan bahwa Investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba.

4.4.2 Proporsi Komisaris Independen terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil pengujian proporsi komisaris independen yang diukur dengan menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang berpengaruh negatif sesuai dengan pernyataan Suranta dan Midiastuty (2005) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pengawasan merupakan alat yang sangat berguna bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengembalian keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, sehingga mereka akan cenderung menghindari manajemen laba. Di lain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki komisaris independen yang rendah akan memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk melakukan manajemen laba secara bebas.

4.4.3 Ukuran Dewan Direksi terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil pengujian ukuran dewan direksi yang diukur dengan total anggota dari dewan direksi terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian Midiastuty & Machfoedz (2003) yang membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan direksi. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, pada perusahaan perbankan direksi dilindungi sebuah peraturan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status tersebut, Direksi senantiasa bertindak independen, sehingga tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antar Direksi maupun hubungan dengan Dewan Komisaris.

4.4.4 Ukuran Komite Audit terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil pengujian ukuran komite audit ini dapat diperoleh dengan cara membagi komite Audit yang kompeten di bidang keuangan dengan jumlah komite Audit terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian Suranta dan Midiastuty (2005) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit bekerja sama dengan pihak yang berkaitan dengan fungsi internal audit dan staf keuangan perusahaan. Komite audit akan melakukan *review* terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pengungkapan dan isi yang telah diaudit oleh akuntan publik, melakukan *review* mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi, hal-hal serta penilaian signifikan lainnya yang terdapat pada laporan keuangan, independensi dan obyektifitas dari akuntan publik. Hubungan agensi akan terjadi jika *principal* mempekerjakan orang lain, dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *principal*. Hasil yang tidak berpengaruh dimungkinkan karena pada perusahaan perbankan terdapat komite lain selain komite audit seperti komite remunerasi dan komite Nominasi yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam

menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif. Selain itu, hasil yang tidak berpengaruh mungkin disebabkan karena regulasi mengenai fungsi dan wewenang komite audit merupakan hal yang baru untuk diterapkan, mengingat pedoman tugas-tugas dan fungsi komite audit yang dijelaskan dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia baru diterbitkan tahun 2006, akibatnya penerapan fungsi dan wewenang komite audit dapat mengalami kendala-kendala seperti masalah komunikasi dengan dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal dan eksternal serta pihak lain sebagai aspek yang penting dalam keberhasilan kerja komite audit.

4.4.5 Leverage terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil pengujian *leverage* yang diukur dengan membandingkan total hutang dengan total aset terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel *leverage* mempunyai pengaruh yang positif terhadap manajemen laba.

Secara umum *leverage* merupakan seberapa besar pinjaman yang atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan akan cenderung melaporkan *profitabilitas* yang tinggi pula. Disamping itu, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba yang tinggi pula. Hasil penelitian yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba sesuai dengan penelitian Darmawanti (2003) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

4.4.6 Kualitas Audit terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil pengujian kualitas audit yang diukur dengan variabel *dummy*, jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4*, maka diberikan nilai 0 terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang positif terhadap manajemen laba.

Kualitas audit dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran KAP, ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big 4*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big 4*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. Hasil yang tidak berpengaruh dimungkinkan karena sebagian besar perusahaan sampel mempunyai kantor akuntan publik non *big 4* dalam meng-audit laporan keuangannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian kepemilikan institusional ini dapat diperoleh dengan cara membagi total saham yang dimiliki perusahaan dengan total saham beredar terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
2. Berdasarkan hasil pengujian proporsi komisaris independen yang diukur dengan menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba.
3. Berdasarkan hasil pengujian ukuran dewan direksi yang diukur dengan total anggota dari dewan direksi terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba.
4. Berdasarkan hasil pengujian ukuran komite audit ini dapat diperoleh dengan cara membagi komite Audit yang kompeten di bidang keuangan dengan jumlah komite Audit terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
5. Berdasarkan hasil pengujian *leverage* yang diukur dengan membandingkan total hutang dengan total aset terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa variabel *leverage* mempunyai pengaruh yang positif terhadap manajemen laba.
6. Berdasarkan hasil pengujian kualitas audit yang diukur dengan variabel *dummy*, jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4*, maka diberikan nilai 0 terhadap manajemen laba, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel kualitas audit tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap manajemen laba.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- a. Populasi penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2013.
- b. Variabel bebas dalam penelitian ini hanya empat variabel yang digunakan sebagai untuk proksi ukuran dari mekanisme *good corporate governance*.

5.3 Saran

1. Bagi investor pada perusahaan perbankan hendaknya mempertimbangkan ukuran dewan direksi, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh negatif yang terbesar terhadap manajemen laba. Pada perusahaan perbankan direksi dilingkupi sebuah peraturan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status tersebut, Direksi senantiasa bertindak independen,.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak variabel, tidak hanya menggunakan rasio keuangan dan komponen GCG sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, tetapi bisa menambahkan variabel bebas lain seperti profil perusahaan yang bisa dilihat dari umur perusahaan dan bidang usaha perusahaan.